

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

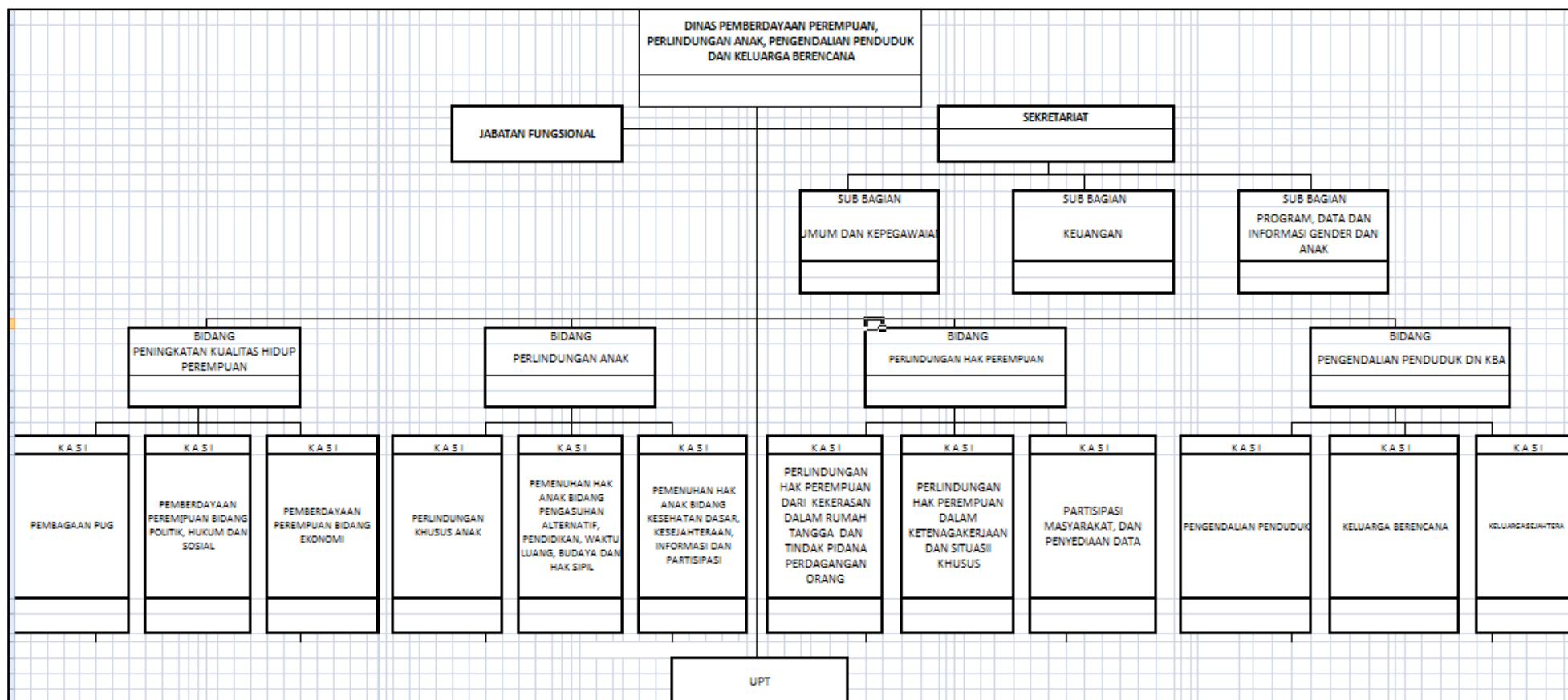
1. Susunan Organisasi

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- a. Sekretariat yang terdiri dari sub bagian umum, keuangan dan perencanaan serta evaluasi;
- b. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan terdiri dari : Seksi Pelembagaan PUG, Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial dan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.
- c. Bidang Perlindungan Anak terdiri dari : Seksi Perlindungan Khusus Anak, Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Waktu Luang, Budaya Dan Hak Sipil serta Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar, Kesejahteraan, Informasi Dan Partisipasi.
- d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan terdiri dari : Seksi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan dan Situasi Khusus, dan Seksi Partisipasi Masyarakat dan Penyediaan Data;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari Seksi Pengendalian Penduduk, seksi Keluarga Berencana dan Seksi Keluarga Sejahtera

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja dinas, mengkoordinir pelaksanaan surat menyurat, pengelolaan keuangan dan penyediaan kebutuhan data, melaksanakan program dan kegiatan dibidang kesekretariatan serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Fungsi Sekretariat :

- 1) Mengkoordinir surat menyurat, Kearsipan dan Urusan Rumah Tangga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2) Membina, Melayani dan Menyediakan Fasilitas Kantor dan Pegawai di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 3) Mengkoordinir Ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 4) Memfasilitasi penyusunan perencanaan Program Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 5) Mengkoordinir Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan, Pembukuan, Pelaporan, Ferivikasi dan Rencana Kerja disemua Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

- 6) Melaksanakan Tugas lainnya dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan [PKHP]

Bidang PKHP mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan publik bidang PKHP, menyusun kebijakan, menyelenggarakan koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan serta Pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang PKHP. Bidang PKHP Mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan dan pengkajian bahan kebijakan teknis, perencanaan dan kegiatan bidang PKHP
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik bidang PKHP
- 3) Penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, peningkatan kapasitas, pendampingan serta pengendalian bidang PKHP
- 4) Penyelenggaraan upaya penguatan Kelembagaan dan lembaga layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat.
- 5) Penyelenggaraan upaya edukasi, sosialisasi, penyebaran informasi bidang PKHP
- 6) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang PKHP
- 7) Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak. Bidang Perlindungan Anak Mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak;
- 2) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak;

- 3) penyiapan perumusan kajian kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak;
- 4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak;
- 5) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak;
- 6) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak;
- 7) penyiapan pelembagaan perlindungan anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- 8) penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 9) penyiapan penguatan dan fasilitatif lembaga komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah;
- 10) penyediaan dukungan administrasi lembaga komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah;
- 11) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Tugas Pokok Bidang Perlindungan Hak Perempuan adalah melaksanakan koordinasi, penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja serta melaksanakan program dan kegiatan perlindungan hak perempuan dari tindakan kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, hak perempuan dalam ketenagakerjaan, hak perempuan dalam kondisi khusus, partisipasi masyarakat, data dan informasi serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Fungsi Bidang Perlindungan Hak Perempuan adalah :

- 1) Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan orang, Hak Perempuan dalam Ketenaga kerjaan, Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus, partisipasi masyarakat, Data dan Informasi
- 2) Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Hak Perempuan korban tindak kekerasan dan Tindak Pidana perdagangan orang, Hak Perempuan dalam Ketenaga kerjaan, Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus, partisipasi masyarakat, Data dan Informasi
- 3) Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi fasilitasi dan integrasi serta kerja sama pelaksanaan kegiatan Pencegahan Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan orang, Hak Perempuan dalam Ketenaga kerjaan, Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus, partisipasi masyarakat, Data dan Informasi
- 4) Pengarahan dan pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi serta kerja sama Pelaksanaan kegiatan Perlindungan Hak Perempuan korban tindak kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Hak Perempuan dalam Ketenaga kerjaan, Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus, partisipasi masyarakat, Data dan Informasi

- 5) Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi serta kerja sama rehabilitasi sosial perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang
- 6) Pengarahan dan Pelaksanaan Koordianasi, fasilitasi dan integrasi serta kerja sama rehabilitasi medis perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang
- 7) Pengarahan dan Pelaksanaan Koordianasi, fasilitasi dan integrasi serta kerja sama konseling psikologis perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- 8) Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi pendampingan hukum perempuan korban tindak kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 9) Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi failitasi dan intergasi program dan kegiatan pemulangan dan reintegrasi perempuan korban tindak kekerasan dan Tindak Pidana perdagangan orang
- 10) Pengarahan dan pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi program dan kegiatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan Tindak Pidana perdagangan orang
- 11) Pengarahan dan Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan integrasi program dan kegiatan Advokasi, Sosialisasi, KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang Tindak Kekerasan, Tindak Pidana Perdagngan Orang, Perempuan Tenaga Kerja dan Perempuan dalam kondisi khusus
- 12) Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan integrasi program dan kegiatan Pencatatan, analisis dan Pelaporan analisa dan penyajian data korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Partisipasi masyarakat
- 13) Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi Program dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaaan Perlindungan Hak Perempuan

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok Penyusunan Perumusan Kebijakan, Strategi dan Rencana Kerja Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- 4) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- 5) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- 6) Pelaksanaan fasilitasi pelayanan KB;
- 7) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- 1) mempersiapkan bahan penyusunan draft rumusan kebijakan;
- 2) mempersiapkan rencana pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan;
- 3) mempersiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan;
- 4) mempersiapkan bahan dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait kebijakan yang dirumuskan;
- 5) mempersiapkan bahan dalam proses penetapan kebijakan;

- 6) mempersiapkan bahan dalam proses sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan;
- 7) menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan;
- 8) menyiapkan proses dokumentasi pelaksanaan kebijakan;
- 9) menyiapkan proses pendistribusian kebijakan;
- 10) menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan; dan
- 11) menyiapkan, menyusun dan mendokumentasikan rencana evaluasi pelaksanaan kebijakan.

B. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

1. Sumberdaya Manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu perangkat daerah dalam menjalankan roda organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya. Hal tersebut sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tergambar dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.
Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin**

| No. | Struktur Organisasi | S2 | | S1 | | D4 | | D3 | | D1 | | SMA SEDERAJAT | | SMP/SD | | Jumlah Total |
|-----|-------------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---------------|---|--------|--|--------------|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | | | |
| 1. | Kepala | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2. | Sekretariat | | 1 | 4 | 4 | | | | 1 | | | | | | | 10 |
| 3. | Bidang Perlindungan Perempuan | | 0 | 3 | 2 | | | | | | | 1 | | | | 6 |
| 4. | Bidang Perlindungan Hak Anak | | 2 | | 4 | | | | 1 | | | | 1 | | | 8 |
| 5. | Bidang PKHP | | 2 | | 3 | | | | 1 | | | | | | | 6 |

| No. | Struktur Organisasi | S2 | | S1 | | D4 | | D3 | | D1 | | SMA SEDERAJAT | | SMP/SD | | Jumlah Total |
|-----|---------------------------------------|----|---|----|----|----|---|----|---|----|---|---------------|---|--------|---|--------------|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 6. | Bidang Pengendalian Penduduk dan KB | | 1 | | 4 | | | | 1 | | | | | | | 6 |
| 7. | Jumlah Pegawai Berdasar Jenis Kelamin | 0 | 7 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2016

Secara struktural organisasi, jumlah pegawai berdasarkan eselon di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan jumlah Eselon II A, sebanyak 1 orang, Eselon IIIA sebanyak 1 laki-laki dan 4 perempuan dan untuk Eselon IV A sebanyak 2 laki-laki dan 12 perempuan. selengkapnya pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Eselon Tahun 2016

| No | Eselon | Laki-Laki | Perempuan |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 1 | Eselon II A | | 1 |
| 2 | Eselon III A | 1 | 4 |
| 3 | Eselon III B | | |
| 4 | Eselon IV A | 2 | 12 |
| | Jumlah | 3 | 17 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2016

Sementara itu jika dilihat dari golongan dapat dilihat, jumlah golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 26 orang dan golongan II sebanyak 4 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepulauan Riau Berdasarkan Golongan Tahun 2016

| No | Jabatan | PNS Golongan (orang) | | | |
|----|--|----------------------|-----|----|---|
| | | IV | III | II | I |
| 1 | Ka. Badan | 1 | | | |
| 2 | Sekretaris | 1 | | | |
| 3 | Kabid PKHP | 1 | | | |
| 4 | Kabid Pengendalian Penduduk dan KB | 1 | | | |
| 5 | Kabid Perlindungan Hak Perempuan | 1 | | | |
| 6 | Kabid Perlindungan Anak | 1 | | | |
| 7 | Kasubag Perencanaan dan Evaluasi | | 1 | | |
| 8 | Kasubag Umum | | 1 | | |
| 9 | Kasubag Keuangan | | 1 | | |
| 10 | Kasubid Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang | | 1 | | |
| 11 | Kasubid Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan Situasi Khusus | | 1 | | |
| 12 | Kasubid Partisipasi Masyarakat dan Penyediaan Data | | 1 | | |
| 13 | Kasubid Pelembagaan PUG | | 1 | | |
| 14 | Kasubid Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial | | 1 | | |
| 15 | Kasubid Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi | | 1 | | |
| 16 | Kasubid Perlindungan Khusus Anak | | 1 | | |
| 17 | Kasubid Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Hak Sipil | | 1 | | |
| 18 | Kasubid Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar, Kesejahteraan, Informasi dan Partisipasi | 1 | | | |
| 19 | Kasubid Keluarga Sejahtera | | 1 | | |
| 20 | Kasubid Keluarga Berencana | | 1 | | |

| No | Jabatan | PNS Golongan (orang) | | | |
|---------------|---------|----------------------|-----|----|---|
| | | IV | III | II | I |
| 21 | Staf | | 13 | 4 | |
| Jumlah | | 7 | 26 | 4 | 0 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2016

2. Sumberdaya Aset

Adapun rekapitulasi inventaris sumberdaya aset Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
**Rekapitulasi Inventaris Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
 dan Keluarga Berencana Kepulauan Riau Tahun 2015**

| No. | Nama Barang | Tahun 2011 | | Nama Barang | Tahun 2012 | | Nama Barang | Tahun 2013 | | Nama Barang | Tahun 2014 | | Nama Barang | Tahun 2015 | |
|-----|-----------------|----------------|--------|-------------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|----------------------|------------|--------|--|----------------|--------|
| | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah |
| 1 | AC | Unit | 1 | AC | Unit | 1 | AC | Unit | 2 | Air Cooler | Unit | 4 | AC | Unit | 6 |
| 2 | AC | Unit | 10 | Gorden | Paket | 1 | Camera | Unit | 1 | Dispenser | Unit | 4 | Bak Mandi | Unit | 1 |
| 3 | Almari | Unit | 2 | Handycam | Unit | 1 | CCTV | Unit | 1 | DVDRecorder | Unit | 1 | Dinding partisi bahan meubel dipadu wallpaper dan gypsum | M ² | 23 |
| 4 | Batt Pingpong | kotak | 8 | Infokus | Unit | 1 | Filling Cabinet | Unit | 8 | Filling Kabinet | Unit | 5 | Dinding partisi gypsum | M ² | 15 |
| 5 | Brankas | Unit | 1 | Kamera | Unit | 1 | Gorden | Unit | 1 | Infokus | Unit | 1 | Dispenser | Unit | 1 |
| 6 | Dispenser | Unit | 1 | Komputer Notebook | Unit | 1 | Infokus | Unit | 1 | Kamera | Unit | 1 | Etalase | Unit | 1 |
| 7 | Faksimile | Unit | 1 | Komputer Netbook | Unit | 1 | Kulkas | Unit | 1 | Kamera dan Aksesoris | Unit | 1 | Etalase kaca full hitam | M ² | 14 |
| 8 | Filling Kabinet | Unit | 3 | Komputer Notebook | Unit | 1 | Kursi Kerja | Unit | 6 | Karpet | Unit | 1 | Filling Kabiner | Unit | 2 |
| 9 | Kamera | Unit | 1 | Komputer Notebook | Unit | 1 | Kursi Kerja | Unit | 2 | Kipas Angin | Unit | 1 | Filling Kabinet | Unit | 3 |
| 10 | Kamera | Unit | 1 | Kursi Rapat | Unit | 20 | Kursi Rapat | Unit | 40 | Komputer | Unit | 1 | Filling Kabinet | Unit | 1 |
| 11 | Karpet | M ² | 225 | Kursi Model Lipat | Unit | 30 | Laptop | Unit | 1 | Kulkas | Unit | 4 | Gorden | Unit | 1 |
| 12 | Kulkas | Unit | 1 | Layanan Internet | Unit | 1 | Laptop | Unit | 1 | Laptop | Unit | 1 | Komputer PC | Unit | 1 |
| 13 | Kursi | Unit | 4 | Meja Setrika | Unit | 30 | Laptop | Unit | 1 | Laptop | Unit | 1 | Komputer PC | Unit | 2 |

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Nama Barang | Tahun 2011 | | Nama Barang | Tahun 2012 | | Nama Barang | Tahun 2013 | | Nama Barang | Tahun 2014 | | Nama Barang | Tahun 2015 | |
|-----|----------------------|------------|--------|----------------------|------------|--------|--|------------|--------|-------------------------|----------------|--------|----------------|------------|--------|
| | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah |
| 14 | Kursi kerja | Unit | 4 | Mesin Obras | Unit | 2 | Meja Kerja | Unit | 2 | Laptop | Unit | 1 | Kursi | Unit | 2 |
| 15 | Kursi kerja Eselon 2 | Unit | 1 | Mesin Pemotong | Unit | 5 | Mesin Tik | Unit | 1 | Lemari | Unit | 4 | Kursi Kerja | Unit | 10 |
| 16 | Kursi Kerja Eselon 3 | Unit | 5 | Mesin Tik | Unit | 1 | Meubellier plastik | Unit | 40 | Mesin Penghancur Kertas | Unit | 1 | Kursi Rapat | Unit | 4 |
| 17 | Kursi kerja staff | Unit | 18 | Notebook | Unit | 1 | Mobil Mini Bus | Unit | 1 | Notebook | Unit | 1 | Kursi Rapat | Unit | 4 |
| 18 | Lemari Buku | Unit | 4 | Notebook | Unit | 1 | Notebook | Unit | 1 | Notebook | Unit | 1 | Laptop | Unit | 2 |
| 19 | Mebelair | Paket | 1 | Notebook | Unit | 1 | Notebook | Unit | 2 | Papan Penunjuk Arah | Unit | 1 | Laptop | Unit | 1 |
| 20 | Meja Kerja | Unit | 4 | Papan Informasi | Unit | 1 | Papan Nama Informasi Pelayanan Penunjuk Arah | Unit | 7 | Partisi Gypsum | M ² | 34 | Layar Infocus | Unit | 1 |
| 21 | Meja Kerja Eselon 2 | Unit | 1 | Papan Informasi | Unit | 1 | PC | Unit | 1 | Partisi kaca | M ² | 20 | Lemari | Unit | 1 |
| 22 | Meja Kerja Eselon 3 | Unit | 5 | Papan Nama Informasi | Unit | 1 | PC | Unit | 1 | Partisi Triplek | M ² | 55 | Lemari 2 Pintu | Unit | 1 |
| 23 | Meja Kerja Rapat | Unit | 1 | PC | Unit | 9 | PC | Unit | 1 | Printer | Unit | 1 | Lemari 3 Pintu | Unit | 1 |
| 24 | Meja Kerja Staff | Unit | 11 | PC | Unit | 2 | Printer | Unit | 1 | Printer | Unit | 1 | Lemari Piring | Unit | 1 |

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Nama Barang | Tahun 2011 | | Nama Barang | Tahun 2012 | | Nama Barang | Tahun 2013 | | Nama Barang | Tahun 2014 | | Nama Barang | Tahun 2015 | |
|-----|--------------------------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------------------|------------|--------|------------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|
| | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah |
| 25 | Meja Pingpong | Unit | 4 | PC | Unit | 2 | Printer | Unit | 3 | Printer dan Scan | Unit | 2 | Meja ½ Biro | Unit | 2 |
| 26 | Mesin Penghancur kertas | Unit | 1 | PC | Unit | 1 | Printer | Unit | 1 | Printer Laser | Unit | 1 | Meja 1 Brio | Unit | 1 |
| 27 | Net Pingpong dan Tiang Besi | Unit | 1 | Printer | Unit | 2 | Printer | Unit | 1 | Printer Portabel | Unit | 1 | Meja Kecil | Unit | 1 |
| 28 | Papan Nama Informasi Pelayanan | Unit | 4 | Printer | Unit | 2 | Proyektor | Unit | 1 | Printer Portable | Unit | 1 | Meja Kerja | Unit | 1 |
| 29 | Papan Nama Informasi Pelayanan | Unit | 2 | Printer | Unit | 1 | Scanner | Unit | 1 | Renovasi Ruang | Unit | 1 | Meja Makan | Unit | 1 |
| 30 | Printer | Unit | 1 | Printer | Unit | 1 | Sofa | Unit | 1 | Sofa | Unit | 4 | Meja Rapat | Unit | 1 |
| 31 | Rak Piring | Unit | 1 | Printer | Unit | 1 | Sofa | Unit | 1 | Telepon | Unit | 1 | Meja Sudut | Unit | 1 |
| 32 | Sofa | Unit | 1 | Sound System | Unit | 1 | Televisi/Alat Multimedia | Unit | 1 | Televisi | Unit | 4 | Mesin Pompa Air | Unit | 1 |
| 33 | Stetoskop | Unit | 4 | Sound System | Unit | 1 | | | | Televisi | Unit | 2 | Papan Informasi | Unit | 1 |

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Nama Barang | Tahun 2011 | | Nama Barang | Tahun 2012 | | Nama Barang | Tahun 2013 | | Nama Barang | Tahun 2014 | | Nama Barang | Tahun 2015 | |
|-----|----------------------|------------|--------|-------------------------|----------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah | | Satuan | Jumlah |
| 34 | Televisi | Unit | 1 | Sound System | Unit | 1 | | | | Teralis | Unit | 9 | Papan Nama Instansi | Unit | 1 |
| 35 | Tempat Tidur Periksa | Unit | 4 | Tower | M ² | 30 | | | | UPS | Unit | 8 | Papan Tulis | Unit | 1 |
| 36 | Tensimeter Digital | Buah | 4 | Wireless Radio Backbone | Unit | 2 | | | | Wireless | Unit | 1 | Partisi Kaca | Unit | 1 |
| 37 | Tiang Bendera | Unit | 1 | | | | | | | | | | Pintu kaca alumunium | M ² | 2 |
| 38 | | | | | | | | | | | | | Printer | Unit | 1 |
| 39 | | | | | | | | | | | | | Printer | Unit | 1 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | Scanner | Unit | 1 |
| 41 | | | | | | | | | | | | | Shower Air | Unit | 1 |
| 42 | | | | | | | | | | | | | Sofa | Unit | 1 |
| 43 | | | | | | | | | | | | | Tempat Cuci Piring | Unit | 1 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2015

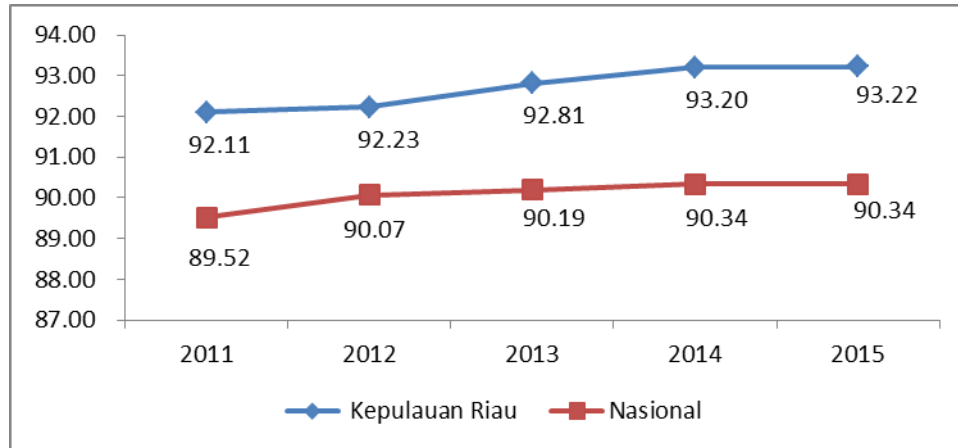
C. Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Adapun perkembangan capaian indikator kinerja program dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program tersebut diukur melalui 3 indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Persentase pencapaian ARG dilihat dari Jumlah ARG terhadap total APBD. Capaian kinerja indikator IPG berdasarkan pencatatan perhitungan lama menunjukkan perkembangan yang meningkat, meskipun demikian belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 capaian IPG sebesar 66,27, kondisi ini masih berada dibawah target yang ditetapkan tahun 2015 yaitu sebesar 70,5. Sementara itu jika capaian tersebut dikonversikan dengan perhitungan baru IPG. Capaian kinerja IPG menjadi meningkat bahkan berada diatas rata-rata nasional. Meskipun capaian ini cukup tinggi namun capaian ini masih menunjukkan adanya kesenjangan gender. Cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Kepri menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :



Gambar 2.1. Persandingan capaian IPG Provinsi Kepri dengan IPG Nasional.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016

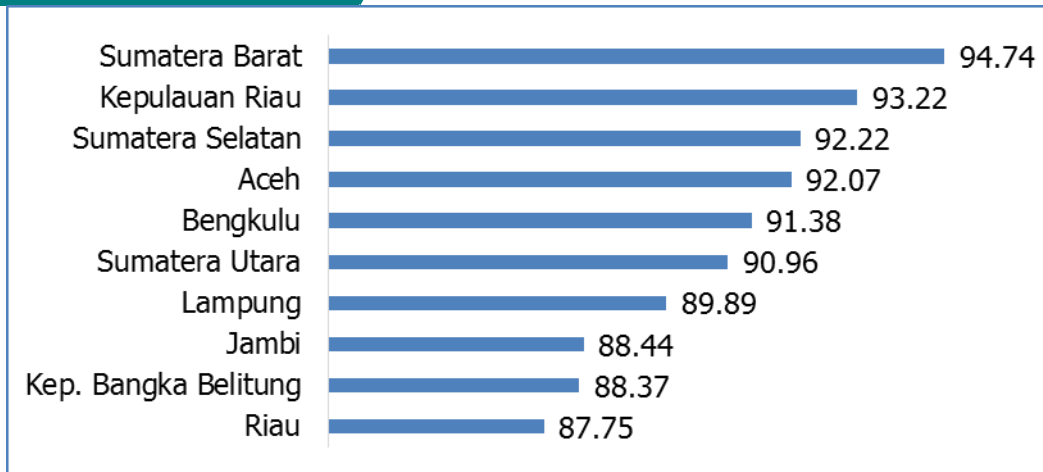
Dilihat capaian IPG kabupaten kota Kepri menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota. Kota Tanjungpinang merupakan kota dengan IPG tertinggi sedangkan Kabupaten Lingga capaian IPGnya rendah. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :

| No | Kab/Kota | Angka Harapan Hidup 2014 | | Harapan Lama Sekolah 2014 | | Rata-rata Lama Sekolah 2014 | | Pengeluaran 2014 | | IPG 2014 | IPG 2015 |
|----|-------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------|--------|----------|----------|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | | |
| 1 | Karimun | 67,12 | 70,82 | 11,62 | 12,44 | 8,11 | 7,35 | 17.224 | 9.252 | 91,16 | 91,18 |
| 2 | Bintan | 67,98 | 71,74 | 11,78 | 12,24 | 8,83 | 8,15 | 19.803 | 11.414 | 92,15 | 92,41 |
| 3 | Natuna | 61,51 | 64,88 | 13,67 | 13,94 | 8,46 | 7,65 | 19.458 | 10.824 | 90,84 | 90,85 |
| 4 | Lingga | 57,84 | 60,99 | 11,88 | 11,56 | 6,32 | 5,37 | 16.475 | 9.105 | 88,59 | 89,11 |
| 5 | Kepulauan Anambas | 64,61 | 67,95 | 11,41 | 11,88 | 6,91 | 5,92 | 16.280 | 8.293 | 89,11 | 89,25 |
| 6 | Kota Batam | 70,78 | 74,71 | 12,55 | 12,79 | 10,99 | 10,63 | 24.577 | 16.032 | 94,45 | 94,62 |
| 7 | Kota Tanjungpinang | 69,55 | 73,42 | 13,63 | 14,25 | 10,19 | 9,70 | 17.141 | 14.022 | 96,54 | 96,58 |
| | Provinsi Kepulauan Riau | 67,28 | 71,13 | 12,38 | 12,66 | 9,78 | 9,34 | 18.679 | 11.625 | 93,20 | 93,22 |

Gambar 2.2. Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Kepri dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika diperbandingkan dengan provinsi lain di sekitar Kepri menunjukkan capaian Kepri lebih bagus, berada dibawah Sumatera. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :



Gambar 2.3. Persandingan capaian IPG Provinsi Kepri dengan IPG Provinsi lainnya di Wilayah Sumatera Tahun 2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kepri pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun pada tahun 2012. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang *mensupport* indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

| NO | NAS/PROV | TAHUN 2011 | TAHUN 2012 | TAHUN 2013 | TAHUN 2014 | TAHUN 2015 |
|----|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Nasional | 69,14 | 70,07 | 70,46 | 70,68 | 70,83 |
| 2 | Provinsi Kepri | 60,62 | 59,32 | 60,79 | 60,54 | 62,15 |

Gambar 2.4. IDG Provinsi Keri 2011-2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi KEPRI, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kabupaten Lingga, Natuna, Kepulauan Anambas dan Kota Batam, serta karimun memiliki angka dbawah 60, bahkan Kabupaten lingga hanya 40,75. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

| No | Kabupaten/ Kota | Keterlibatan Perempuan di Parlemen | Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi | Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja | Indeks Pemberdayaan Gender |
|----|-------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|
| 1 | Karimun | 10,00 | 43,19 | 24,64 | 55,55 |
| 2 | Bintan | 20,00 | 46,02 | 23,63 | 65,44 |
| 3 | Natuna | 10,00 | 39,39 | 23,53 | 52,85 |
| 4 | Lingga | 0,01 | 48,00 | 22,32 | 40,75 |
| 5 | Kepulauan Anambas | 10,00 | 49,47 | 25,67 | 56,96 |
| 6 | Kota Batam | 8,00 | 47,86 | 28,19 | 57,83 |
| 7 | Kota Tanjungpinang | 26,67 | 42,82 | 26,02 | 70,33 |
| | Provinsi Kepulauan Riau | 13,33 | 46,41 | 27,12 | 62,15 |

Gambar 2.5. IDG Provinsi Kepri dan kabupaten Kota 2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Jika diperbandingkan dengan provinsi sekitar Kepri, maka nampak posisi provinsi Kepri berada dibawah provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, dan Sumatera Barat. Kepri lebih bagus dari Lampung dan Bangka Belitung. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

| NO | PROVINSI SE SUMATERA | IDG TAHUN 2015 |
|----|----------------------|----------------|
| 1 | Riau | 74,59 |
| 2 | Sumatera Selatan | 70,36 |
| 3 | Bengkulu | 68,86 |
| 4 | Sumatera Utara | 67,81 |
| 5 | Aceh | 65,57 |
| 6 | Jambi | 62,43 |
| 7 | Sumatera Barat | 62,42 |
| 8 | Kepulauan Riau | 62,15 |
| 9 | Lampung | 62,01 |
| 10 | Bangka Belitung | 56,29 |

Gambar 2.6. IDG Provinsi Kepri dan Provinsi Sekitar 2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Persentase pencapaian ARG dilihat dari Jumlah ARG terhadap total APBD selama 5 tahun menunjukkan kinerja yang cukup baik dimana capaian kinerja sudah melampaui target yang ditetapkan.

Kinerja pelaksanaan anggaran responsif gender ditunjukkan dengan Persentase Anggaran Responsif Gender dalam belanja langsung APBD Provinsi sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 7%. Berkaitan dengan Sistem Data Gender dan Anak, Persentase SKPD yang memiliki data terpilah terkait gender dan anak baru 1%, Persentase SKPD yang memiliki SDM yang terlatih dalam pengelolaan data terpilah terkait gender dan anak sebesar 1% dan Tersedianya dokumen penyajian analisis data dan gender sebanyak 1 dokumen.

2. Progam Perlindungan Anak

Bila dilihat dari data anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Kasus yang paling banyak terjadi pada anak laki-laki sebesar 248 orang pada tahun 2016. Bila dilihat pada Kabupaten/Kota, di Kota Batam Anak yang Berhadapan dengan Hukum banyak terjadi sebesar 115 orang. Data ABH dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

| NO | KABUPATEN/KOTA | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|----|----------------|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | TANJUNGPINANG | 41 | 2 | 29 | 0 | 22 | 1 | 54 | - |
| 2 | BATAM | 65 | 2 | 112 | 2 | 138 | 4 | 115 | 2 |
| 3 | BINTAN | 19 | 1 | 12 | 0 | 14 | 0 | 25 | - |
| 4 | NATUNA | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | ANAMBAS | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 6 | LINGGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 7 | KARIMUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| JUMLAH | | 137 | 5 | 159 | 2 | 187 | 5 | 248 | 3 |
| | | 142 | 161 | 192 | 251 | | | | |

Jumlah Kota Layak Anak (KLA) sampai dengan Tahun 2016 baru terdapat di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Batam, inipun masih berada dalam kategori Pratama. Sementara untuk Kabupaten Karimun, Lingga, Natuna, Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang belum dapat dikatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Data KLA dapat dilihat pada Tabel Dibawah ini.

| NO | KAB/KOTA | KLA KAB/KOTA | KLA KECAMATAN | KLA KELURAHAN/DESA | JUMLAH |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-----------|
| 1 | BINTAN | 1 | 10 | 2 | 12 |
| 2 | KARIMUN | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 3 | TANJUNGPINANG | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | LINGGA | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | BATAM | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | NATUNA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ANAMBAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 0 | 35 | 2 | 37 |

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Persoalan lain yang muncul berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Pada provinsi Kepri masih ditemukan kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data menunjukkan sampai dengan tahun 2015 persentase kasus KDRT sebesar 2%.

Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Hidup Perempuan dan Anak diukur melalui 17 indikator sebagai berikut :

- a. Pengembangan Forum Anak di Kab/ Kota, terdapat 72 forum anak di Provinsi Kepri hingga tahun 2016.
- b. Status Kota Layak Anak di Kab/ Kota sebanyak 2 Kabupaten/Kota dengan Kategori Pratama yaitu Kota Batam dan Kabupaten Bintan.
- c. Jumlah Desa/Kelurahan Bebas Kekerasan sebanyak 10 Desa/Kelurahan
- d. Jumlah Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi
- e. Jumlah Perda yang Berpihak Pada Perempuan dan Anak yang dihasilkan sebanyak 4 Perda
- f. Jumlah Regulasi Pergub yang Mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 9 Pergub
- g. Capaian Standar Pelayanan Minimal Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang sebanyak 1 SPM
- h. Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang PTPPO sebanyak 1 SOP
- i. Status capaian Standar Pelayanan Minimal Kegiatan dan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A
- j. Jumlah Standar Operasional Prosedur Kegiatan dan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A sebanyak 20 SOP
- k. Jumlah Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Perlindungan Anak Amanat Perda Perlindungan Anak
- l. Jumlah Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perlindungan Anak Amanat Perda Perlindungan Anak
- m. Rasio KDRT
- n. Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur
- o. Persentase Perusahaan yang telah mematuhi batas usia minimal pada tenaga kerjanya
- p. Jumlah Pengaduan Tentang Kejadian Kekerasan Terhadap Perempuan

q. Jumlah Pengaduan Tentang Pelanggaran Tentang Pelanggaran Terhadap Anak-anak.

Rata-rata capaian indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat mencapai target. Indikator tersebut adalah Rasio KDRT dan Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur.

Untuk kasus – kasus kekerasan dan perdagangan orang (trafiking) setiap Tahun terjadi penurunan. Kecuali di Tahun 2012, angka ini semakin meningkat, dikarenakan semakin gencarnya penyampaian informasi tentang Undang_undang PKDRT kepada masyarakat, sehingga setiap orang menyadari bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan hukum atas setiap ketidakadilan dan kekerasan yang mereka alami. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

| NO | JENIS KASUS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | JUMLAH |
|----|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 1 | TRAFIKING DEWASA | 30 | 81 | 12 | 39 | 18 | 0 | 180 |
| 2 | KDRT DEWASA | 19 | 36 | 43 | 70 | 47 | 33 | 248 |
| 3 | PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | PERLINDUNGAN ANAK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | TITIPAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TERLANTAR DEWASA | 0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 |
| 7 | KEKERASAN DALAM PACARAN/DEWASA | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | PENCERAIAN | 0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 25 |
| 9 | PELECEHAN SEKSUAL DEWASA | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | NON KtPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 |
| 11 | TRAFICKING ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | KEKERASAN TERHADAP ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35 |
| 13 | PELECEHAN SEXUAL ANAK | 0 | 0 | 11 | 25 | 11 | 2 | 49 |
| 14 | HAK ANAK | 0 | 14 | 7 | 19 | 13 | 9 | 62 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 15 | ANAK BERMASALAH HUKUM | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 5 | 24 |
| 16 | ANAK PERLINDUNGAN KHUSUS | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 14 | 34 |
| 17 | ANAK TERLANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | KEKERASAN DALAM PACARAN/ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| TOTAL | | 92 | 166 | 96 | 180 | 145 | 95 | 774 |

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan disetiap Kabupaten/Kota terdapat indikasi semakin menurun sebesar 23 %, penurunan terbesar terjadi di Kota Batam. Sementara di Kabupaten Karimun dan Kepulauan Anambas terjadi peningkatan antara Tahun 2014 ke Tahun 2015 dan memerlukan perhatian yang dari setiap pemangku kepentingan.

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Korban | | | |
|----|----------------|---------------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Tanjungpinang | 72 | 75 | 58 | 143 |
| 2 | Batam | 84 | 490 | 349 | 96 |
| 3 | Bintan | - | 7 | 6 | 22 |
| 4 | Karimun | 21 | 43 | 75 | 13 |
| 5 | Lingga | 9 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | Natuna | - | 32 | 24 | 8 |
| 7 | Kep. Anambas | - | 4 | 6 | 3 |
| 8 | Provinsi Kepri | 88 | 109 | 66 | 33 |
| | Jumlah | 274 | 766 | 590 | 330 |

Capaian Keterwakilan perempuan dalam jabatan Politis (parlemen) pada tahun 2015 sebesar 13,33%, sedangkan perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi capaiannya hanya 46,41% dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja hanya 27,12%. Kondisi ini menunjukkan

bahwa pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau masih rendah sehingga perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, persentase perempuan dan anak korban perdagangan orang yang ditangani sebesar 100%. Begitu pula dengan persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan capaiannya juga mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.

4. Program Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Program peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga diukur melalui 2 indikator yaitu jumlah Desa Prima Percontohan dan jumlah Koperasi Perempuan Percontohan. Capaian kinerja 2 indikator tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik dimana kedua indikator telah mencapai target sebesar 100% selama 5 tahun.

5. Program Keluarga Berencana

Berdasarkan data BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Peserta KB Aktif di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 283.702 orang, sedangkan peserta KB baru sebanyak 48.829 orang. Sementara itu Unmet Need KB pada tahun 2015 capaiannya sebesar 11,91%, menunjukkan bahwa ada pasangan usia subur yang tidak dapat memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi. Dalam rangka mengurangi unmetneed tentunya perlu ada peningkatan pelayanan KB guna pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pencapaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5.
Indikator Kinerja Program KB Provinsi Kepri Tahun 2015

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM KB KAB KOTA | IKP 2015 | REALISASI DESEMBER | % |
|----|---------------------------------------|----------|--------------------|--------|
| 1 | Jumlah Seluruh Peserta KB Baru | | | |
| | - IUD | 1.010 | 3.120 | 308,91 |
| | - MOW | 540 | 860 | 159,26 |
| | - Implant | 1.902 | 2.127 | 111,83 |
| | - MOP | 20 | 9 | 45,00 |
| | - Kondom | 2.873 | 3.397 | 118,24 |
| | - Suntik | 20.892 | 19.955 | 95,52 |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM KB KAB KOTA | IKP 2015 | REALISASI DESEMBER | % |
|----|--|----------------|-----------------------|---------------|
| | - Pil | 21.324 | 19.361 | 90,79 |
| | Jumlah Seluruh Peserta KB Baru | 48.561 | 48.829 | 100,55 |
| 2 | Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif | | | |
| | - IUD | 9.947 | 19.996 | 201,03 |
| | - MOW | 12.673 | 6.817 | 53,79 |
| | - Implant | 14.334 | 19.014 | 132,65 |
| | - MOP | 248 | 1.038 | 418,55 |
| | - Kondom | 11.537 | 19.138 | 165,88 |
| | - Suntik | 87.198 | 114.643 | 131,47 |
| | - Pil | 51.892 | 103.056 | 198,60 |
| | Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif | 187.829 | 283.702 | 151,04 |
| 3 | Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (CPR) | 50,20 | 80,25 | |
| 4 | Persentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | 14,60 | 11,91 | |
| 5 | Persentase Peserta KB dengan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 19,80 | 12,53 | |
| 6 | Persentase Kesertaan KB Pria (PA) (MOP + Kondom) | 6,30 | 6,98 | |
| 7 | Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern | 17,80 | | |
| 8 | Persentase PUS Anggota Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang ber-KB | | | |
| | Persentase PUS Anggota BKB yang ber-KB | 91,00 | 87,38 | |
| | Persentase PUS Anggota BKR yang ber-KB | 87,60 | 93,02 | |
| | Persentase PUS Anggota BKL yang ber-KB | 89,60 | 91,11 | |
| | Persentase PUS Anggota UPPKS yang ber-KB | 69,00 | 77,90 | |
| 9 | Indeks Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan | 54,10 | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM KB KAB KOTA | IKP 2015 | REALISASI DESEMBER | % |
|----|---|----------|--------------------|---|
| | Reproduksi Remaja (KRR) | | | |
| 10 | Persentase Sasaran yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi | 5,00 | | |
| 11 | Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) | 31,60 | | |
| 12 | Persentase Masyarakat yang mengetahui Isu Kependudukan | 28,00 | | |
| 13 | Persentase Provinsi, Kabupaten/Kota yang memasukan Isu Kependudukan ke dalam Renstrada | 40,00 | | |
| 14 | Laporan Realisasi Tri Wulanan Kabupaten/Kota Penerima DAK Tahun 2015 | 100,00 | | |
| 15 | Persentase Kabupaten/Kota yang membangun data base PK 2015 dengan Cakupan minimal 90 % KK | 100,00 | | |
| 16 | Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN | 100,00 | | |
| 17 | Persentase temuan eksternal dan internal yang selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan | 100,00 | | |
| 18 | Jumlah Mitra Kerja dan Tenaga Lini Lapangan yang dilatih : | | | |
| | Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat | 20,00 | | |
| | Refreshing PLKB/PKB (PNS dan Non PNS) | | | |
| | Pelatihan Teknis bagi PLKB/PKB | 295,00 | | |
| | Pelatihan Teknis IUD dan Implant bagi Dokter | 16,00 | | |
| | Pelatihan Teknis IUD dan Implant bagi Bidan | 80,00 | | |
| | Pelatihan Teknis MOP bagi Dokter | 9,00 | | |
| | Pelatihan Teknis MOW bagi Dokter | 9,00 | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM KB KAB KOTA | IKP 2015 | REALISASI DESEMBER | % |
|----|---|----------|--------------------|---|
| 19 | Pemetaan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam Penguatan Program KKBPK | 50,00 | 0,00 | |

Sumber: BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

PUS Peserta KB semua cara di tahun 2015 sebesar 47,05 %, sedangkan yang tidak menggunakan KB sebesar 52,21%. Jumlah PUS yang tidak ber KB di Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi. Paling tinggi di Kota Batam sebesar 60,06% dan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 26,84%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Persentase Peserta KB dan Bukan Peserta KB Tahun 2015

| No | Kabupaten/Kota | CPR | | Tidak Pakai Alat/cara KB | Total |
|-----|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|
| | | Semua Cara | Cara Modern | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(5) |
| 1 | Karimun | 60.83 | 60.12 | 39.17 | 100.00 |
| 2 | Bintan | 54.44 | 53.70 | 45.56 | 100.00 |
| 3 | Natuna | 66.69 | 66.03 | 33.31 | 100.00 |
| 4 | Lingga | 73.16 | 72.84 | 26.84 | 100.00 |
| 5 | Kepulauan Anambas | 69.43 | 68.35 | 30.57 | 100.00 |
| 71 | B A T A M | 39.94 | 39.02 | 60.06 | 100.00 |
| 72 | Tanjung Pinang | 49.79 | 47.89 | 50.21 | 100.00 |
| | Kepulauan Riau | 47.05 | 46.11 | 52.95 | 100.00 |

Sumber: Diolah dari Hasil Survey Sosial dan Ekonomi Nasional, 2015

Unmetneed KB tahun 2015 sebesar 24,05%, ini diterbagi atas unmetneed spasing sebesar 7,36% dan unmetneed limiting sebesar 16,69%. Sementara itu total permintaan berKB sebesar 70,16%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7.
Persentase Unmetneed, Peserta KB Aktif (CPR) dan Total Permintaan ber-KB Tahun 2015

| No | Kabupaten/Kota | Unmetneed | CPR | Total | Permintaan ber- |
|----|----------------|-----------|-----|-------|-----------------|
|----|----------------|-----------|-----|-------|-----------------|

| | | Penjarangan (spacing) | Pembatasan (limiting) | Total Unmetneed | Semua Cara | Cara Modern | Permintaan ber- KB (Total Demand) | KB yang Terpenuhi (Demand Satisfaction) |
|-----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) | (8)=(5)+(7) | (9)=((7)/(8))*100 |
| 1 | Karimun | 2,38 | 18,97 | 21,35 | 60,83 | 60,12 | 81,47 | 73,79 |
| 2 | Bintan | 5,80 | 16,52 | 22,32 | 54,44 | 53,70 | 76,02 | 70,65 |
| 3 | Natuna | 1,78 | 9,53 | 11,31 | 66,69 | 66,03 | 77,34 | 85,37 |
| 4 | Lingga | 2,83 | 6,48 | 9,31 | 73,16 | 72,84 | 82,15 | 88,67 |
| 5 | Kepulauan Anambas | 1,34 | 4,51 | 5,85 | 69,43 | 68,35 | 74,20 | 92,12 |
| 71 | B A T A M | 9,38 | 17,12 | 26,50 | 39,94 | 39,02 | 65,52 | 59,56 |
| 72 | Tanjung Pinang | 5,99 | 21,59 | 27,58 | 49,79 | 47,89 | 75,47 | 63,45 |
| | Kepulauan Riau | 7,36 | 16,69 | 24,05 | 47,05 | 46,11 | 70,16 | 65,72 |

Sumber: Diolah dari Hasil Survey Sosial dan Ekonomi Nasional, 2015

Pemakaian alat kontrasepsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, penggunaan metode kontrasepsi suntikan adalah yang paling diminati. Kondisi ini dapat dilihat dari tingginya persentase PUS berKB yang menggunakan alat kontrasepsi suntikan yaitu sebesar 56,18%, sedangkan yang terendah adalah metode menyusui alami yaitu sebanyak 0,11%. Sementara itu PUS berKB yang menggunakan metode MKJP sebanyak 15,90%. Persentase pemakaian kontrasepsi tahun 2015 sebesar 46,11%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Berdasarkan Metode Tertentu

| No | Kabupaten/Kota | CPR | | | Alat/cara KB yang sedang digunakan | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| | | Semua Cara | Cara Modern | MKJP | MOW | MOP | IUD | Suntikan | Susuk | Pil | Kondom | Intravag/ kondom wanita/ diafragma | Metode menyusui alami | Pantang berkala/ kalender | Lainnya |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (6)+(7)+(8)+(9) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 | Karimun | 60.83 | 60.12 | 7.34 | 1.58 | 0.38 | 2.36 | 61.70 | 3.03 | 28.66 | 0.83 | 0.32 | - | 1.16 | - |
| 2 | Bintan | 54.44 | 53.70 | 16.29 | 1.40 | 1.32 | 4.56 | 52.42 | 9.01 | 26.47 | 3.48 | - | 0.61 | 0.18 | 0.55 |
| 3 | Natuna | 66.69 | 66.03 | 9.40 | 2.72 | - | 2.56 | 54.65 | 4.13 | 34.96 | - | - | 0.99 | - | - |
| 4 | Lingga | 73.16 | 72.84 | 12.65 | 1.69 | - | 2.36 | 57.24 | 8.61 | 29.15 | 0.53 | - | - | 0.43 | - |
| 5 | Kepulauan Anambas | 69.43 | 68.35 | 8.91 | 1.86 | - | 1.40 | 49.57 | 5.65 | 38.99 | 0.97 | - | - | 1.55 | - |
| 71 | B A T A M | 39.94 | 39.02 | 18.83 | 2.75 | 1.60 | 9.86 | 57.43 | 4.63 | 17.41 | 3.75 | 0.28 | - | 2.06 | 0.25 |
| 72 | Tanjung Pinang | 49.79 | 47.89 | 18.76 | 2.13 | 0.43 | 11.62 | 47.50 | 4.59 | 29.03 | 0.88 | - | - | 3.21 | 0.61 |
| | Kepulauan Riau | 47.05 | 46.11 | 15.90 | 2.31 | 1.06 | 7.45 | 56.18 | 5.07 | 23.15 | 2.58 | 0.19 | 0.11 | 1.65 | 0.24 |

Sumber: Diolah dari Hasil Survey Sosial dan Ekonomi Nasional, 2015

Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu. Sedangkan Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah ASFR, dengan catatan bahwa umur dinyatakan dalam satu tahunan. ASFR

tertinggi terjadi pada kelompok usia 25-39 tahun sedangkan TFR di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 2,312. Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau TFR tertinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas. TFR pada masing-masing kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9.
Angka ASFR, TFR dan Rata-rata UKP Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

| No | Kabupaten/Kota | ASFR | | | | | | | TFR | Rata-rata UKP |
|-----|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| | | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Kab. Karimun | 24,43 | 77,39 | 183,43 | 126,91 | 75,43 | 17,65 | 8,36 | 2,568 | 21,77 |
| 2 | Kab. Bintan | 45,52 | 114,08 | 152,08 | 89,75 | 38,71 | 17,37 | 3,62 | 2,306 | 21,76 |
| 3 | Kab. Natuna | 56,49 | 200,46 | 134,80 | 80,69 | 68,87 | 14,72 | 0,36 | 2,782 | 20,84 |
| 4 | Kab. Lingga | 44,89 | 130,55 | 129,46 | 105,57 | 83,92 | 20,95 | 0,46 | 2,579 | 21,18 |
| 5 | Kab. Kepulauan Anambas | 40,53 | 192,92 | 156,69 | 125,76 | 44,94 | 27,74 | 19,47 | 3,040 | 20,81 |
| 71 | Kota. Batam | 15,35 | 95,67 | 152,36 | 86,29 | 71,23 | 23,23 | 5,54 | 2,248 | 23,41 |
| 72 | Kota. Tanjung Pinang | 6,85 | 82,99 | 146,70 | 105,59 | 79,13 | 9,54 | 8,28 | 2,195 | 22,28 |
| | KEP. RIAU | 21,76 | 98,73 | 153,62 | 92,40 | 70,16 | 19,97 | 5,86 | 2,312 | 22,72 |

Sumber: Diolah dari Hasil Survey Sosial dan Ekonomi Nasional, 2015

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Kinerja Renstra Tahun 2011-2015

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|--|----------|-------------------------------|------|-----------|-----------|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | Urusan Pengarusutama an Gender | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | 67 | 67,8 | 68,6 | 70 | 70,5 | 64,6 9 | 65,61 | 65,61 | 66,2 7 | 66,2 7 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | 50,9 6 | 53,4 | 55,8 4 | 58,2 8 | 60,7 | 60,6 2 | 59,3 2 | 59,3 2 | 60,7 9 | 60,7 9 | 119 | 111 | 106 | 104 | 100 |
| | | Persentase pencapaian ARG dilihat dari Jumlah ARG terhadap total APBD | % | 6,9 | 8,1 | 4,9 | 6 | 7 | 8,46 | 10,11 | 5,54 | 22 | | 123 | 125 | 113 | 367 | 0 |
| | Urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kualitas Hidup | Jumlah Pembinaan | Posyandu | 50 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|----------------------|--|---------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | Perempuan | Kelompok Posyandu dari 1061 Posyandu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pembinaan Kelompok BKB dari 130 kelompok BKB | Kelompok | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 | 117 | 117 | 117 | |
| | | Jumlah Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dari 59 Kecamatan | Kecamata n | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 200 | 133 | 133 | |
| | | Jumlah RSSI-B | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| | | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif | % | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Jumlah PIK Remaja di Perusahaan | PIK | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | | |
| | | Jumlah MoU dalam Pelaksanaan PUG di Kab/ Kota | MoU | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 100 | 100 | 50 | 300 | |
| | | Pengembangan Jumlah SATGAS GSI dari 59 SATGAS | SATGAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 100 | 100 | 100 | 83 | |

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|--|------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | Pengembangan Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Program P2WKSS dari 59 Kecamatan | Kecamatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 100 | 100 | 167 | 100 | 167 |
| | | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | % | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 47 | 48 | 47,5 | 48,7 | 48,7 | 10217 | 10435 | 10326 | 10587 | 10587 |
| | | Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta | % | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,3 | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Hidup Perempuan dan Anak | Pengembangan Forum Anak di Kab/ Kota | Forum Anak | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 100 | 100 | 100 | 267 | 267 |
| | | Pengembangan Kota Layak Anak di Kab/ Kota | Kab/ Kota | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 29 | 29 | 100 | 133 | 40 | 483 | 414 |

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|----------------------|---|--------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu PTT Korban Tindakan Kekerasan Berbasis Rumah Sakit | unit | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 200 | | 100 | |
| | | Perkembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi | MoU | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | | 0 | | 113 | |
| | | Pengembangan Regulasi Perda yang Berpihak Pada Perempuan dan Anak | Perda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Pengembangan Regulasi Pergub yang Mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak | Pergub | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | | | 100 | 100 | |

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|----------------------|--|--------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang | dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang PTPPO | dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kegiatan dan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan | dok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 100 | |

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|----------------------|---|--------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | dan Anak P2TP2A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kegiatan dan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A | dok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 100 | |
| | | Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara an Perlindungan Anak Amanat Perda Perlindungan Anak | dok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | |

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|----------------------|--|--------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perlindungan Anak Amanat Perda Perlindungan Anak | dok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 100 | | | |
| | | Rasio KDRT | | 0,95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,019 | 0,036 | 0,043 | 0,097 | 0,097 | 2 | 1,8 | 2,15 | 4,85 | |
| | | Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Persentase Perusahaan yang telah mematuhi batas usia minimal pada tenaga kerjanya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Jumlah Pengaduan Tentang Kejadian Kekerasan Terhadap Perempuan | Kasus | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 92 | 166 | 96 | 180 | 143 | 102 | 184 | 107 | 183 | |

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|----------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|-----------|------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 |
| | | Jumlah Pengaduan Tentang Pelanggaran Tentang Pelanggaran Terhadap Anak-anak | Kasus | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 24 | 352 | 249 | 400 | 0 | 800 | 1173 3 | 8300 |
| | Urusan Peningkatan Kualitas Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4 | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Desa Prima Percontohan | Desa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| | | Jumlah Koperasi Perempuan Percontohan | Koperasi | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Urusan Data dan Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan Data dan Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,6 | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Peran | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|----------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 |
| | Perempuan Di Pedesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,7 | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,8 | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,9 | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Tantangan

- a. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepri masih rendah yaitu 93,22 masih jauh dari angka optimum yaitu 100. Capaian IPG kabupaten kota di Provinsi Kepri juga rendah khususnya Kabupaten Karimun, Lingga, Kepulauan Anambas, dan Natuna. Hal sama juga terjadi pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang masih rendah yaitu 62,15 tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan angka Nasional. Capaian IDG kabupaten juga mengalami hal yang sama yaitu hanya Kabupaten Bintan (65,44) dan Kota Tanjungpinang (70,33) yang mencapai diatas angka provinsi, sedangkan lainnya masih dibawah provinsi yaitu Kabupaten Karimun (55,55), Kabupaten Natuna (52,85), Kabupaten Kepulauan Anambas (56,96), Kabupaten Lingga (40,75), dan Kota Batam (57,83).
- b. Berkembangnya teknologi informasi menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang prima sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman.
- c. Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah menjadi amanah karena tercantum dalam RPJMN, sehingga pemerintah kabupaten dan provinsi wajib mengacu dan tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran, sementara kewajiban-kewajiban dalam penyusunan PPRG masih belum optimal dilaksanakan.
- d. Kepri menjadi daerah tujuan dan transit korban tindak kekerasan dan perdagangan orang dari seluruh wilayah Indonesia. Beberapa pelabuhan “tikus” adalah pintu masuk dalam perdagangan manusia.
- e. Penularan terhadap penyakit menular seksual (PMS), HIV terbuka, karena perdagangan manusia biasanya berkaitan dengan perdagangan seksual.
- f. Usaha-usaha kecil menengah yang dikelola oleh perempuan belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
- g. Kekerasan terhadap anak semakin meningkat dan meluas pada ruang-ruang publik termasuk pernikahan dini yang terpaksa harus dilakukan akibat pergaulan bebas yang makin terbuka.

- h. Distribusi penduduk Kepulauan Riau kurang merata. Rata-rata tingkat kepadatan Kepulauan Riau menunjukkan sekitar 205 per kilometer persegi. Jumlah tersebut lebih padat jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia yang mencapai 124 orang perkilometer persegi. (BPS Kepulauan Riau, 2015).
- i. Tingkat migrasi yang tinggi, hal ini dikarenakan Provinsi Kepri merupakan wilayah kepulauan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga dan memiliki potensi yang strategis untuk menciptakan peluang-peluang terbukanya lapangan pekerjaan bagi penduduknya dan kaum migran yang masuk. Data menunjukkan migrasi masuk ke Kepri sebesar 542 811 jiwa dengan migrasi keluar 9 612 jiwa. Asal migran yang banyak datang dari Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,25 persen dan Provinsi Riau sebesar 2,93 persen (BPS, 2015). Kecenderungan tempat tujuan juga menjadi alternatif bagi para migran yang masuk ke Provinsi Kepri, salah satu wilayah yang menarik di Kepri yaitu Kota Batam.
- j. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- k. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- l. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- m. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- n. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- o. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan.

- p. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- q. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Peluang

- a. Tersedianya sejumlah aturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah yang mengatur tentang pengelolaan data dan informasi gender dan anak, PUG, PPRG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengembangan UMKM perempuan serta jejaring kerja kelembagaan PUG dan PUHA.
- b. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- c. Banyaknya forum-forum nasional, regional dan internasional yang mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Adanya komitmen yang besar dari Kepala Daerah untuk melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak.
- e. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
- f. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan dan media dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
- g. Tersedianya alat analisis yang jelas untuk pelaksanaan PUG.
- h. Terbukanya pendanaan dari berbagai lembaga, baik lembaga masyarakat, swasta, maupun lembaga-lembaga internasional.
- i. Pengendalian penduduk menjadi salah satu program Nasional, karena itu dukungan pendanaan untuk pengendalian penduduk sangat baik.